



## SIKAP POLITIK SOEKARNO TERHADAP PARTAI MASYUMI 1957-1960

Zaini Muslim Ahmad ✉

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Juni 2013

*Keywords:*

*Political attitudes*

*Soekarno, Party*

*Masjumi*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengetahui sikap politik Soekarno dalam mengatasi kemacetan politik , (2) Mengetahui sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi pada masa Demokrasi Terpimpin , (3) Mengetahui reaksi Partai Masyumi terhadap perubahan sikap politik Soekarno .Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yaitu dengan langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Sikap Soekarno dalam mengatasi kemacetan politik adalah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, dekrit ini juga menjadi titik awal bergulirnya Demokrasi Terpimpin yang menampilkan Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter. (2) Partai Masyumi yang dianggap oleh Soekarno sebagai golongan kontra revolusi kerap mendapatkan 'pengkebirian politik' dan sampai akhirnya dibubarkan melalui Penpres No. 7/1959 dan Keppres No.200/1960. (3) Partai Masyumi merespon perubahan sikap politik Soekarno dengan selalu menunjukkan sikap oposisi pada langkah, kebijakan dan kepemimpinan Soekarno.

### Abstract

*The purpose of this study was : ( 1 ) Knowing the political attitudes of Sukarno in overcoming political gridlock , ( 2 ) Know the Party's attitude towards Soekarno Masjumi during Guided Democracy , ( 3 ) Knowing Masyumi reaction to changes in political attitudes Sukarno . Research method used is historical method is to go through the steps heuristic , source criticism , interpretation and writing of history or historiografi. Hasil study concluded the following : ( 1 ) Soekarno attitude in overcoming political gridlock is by issuing a Presidential Decree that declared July 5, 1959 back to 1945 , decree is also the starting point is to show the passing of Sukarno 's Guided Democracy as an authoritarian leader . ( 2 ) Party Masjumi considered by Soekarno as counterrevolutionary groups often get ' pengkebirian politics " and to finally dissolved by Presidential Decree No. . 7/1959 and Presidential Decree No.200/1960 . ( 3 ) Party Masjumi respond to the changing political attitudes Soekarno to always show opposition to measures , policies and leadership of Sukarno .*

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:  
Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: sejarahunnes@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dunia politik adalah dunia yang bergumul dengan kepentingan kekuasaan. Banyak cara yang ditempuh untuk meraih kekuasaan atau mempertahankannya, dari mulai membangun hubungan koalisi sampai melenyapkan musuh yang dianggap membahayakan. Dalam kaca mata politikus penilaian antara mitra dan musuh begitu samar, karena segala sesuatunya baru bisa dilihat jelas atas dasar kepentingan. Sebuah ungkapan anonim berbunyi bahwa *dalam politik tidak ada kawan abadi atau musuh abadi tetapi yang ada hanyalah kepentingan abadi*. Hal itu pula lah yang tercermin dalam hubungan politik antara Presiden Soekarno dengan Partai Masyumi.

Hubungan kedekatan Partai Masyumi dengan Presiden Soekarno perlahan mulai merenggang di awal tahun 1957, ketika Presiden Soekarno mengambil perubahan orientasi sikap dalam menilai jalannya sistem multipartai di Indonesia, yang dengan eksplisit menyampaikan keinginannya untuk mendirikan satu partai negara dan mengubur partai-partai yang lainnya (Suryanegara, 2010 : 366). Kehadiran multipartai dalam ranah demokrasi Indonesia, dianggap oleh Soekarno sebagai penyakit kepartaian, penyakit yang lebih parah dari perasaan kesukuan dan kedaerahan, penyakit yang disinyalir Soekarno menyebabkan bangsa kita selalu cakar-cakaran satu sama lain (Karim, 1983 : 140). Menanggapi pernyataan presiden itu, Mohammad Natsir menegaskan selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada (Noer, 1987 : 354).

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Metode ini merupakan cara pemecahan masalah dengan menggunakan data atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa

yang terjadi dan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif (Gottschalk, 1984 : 18). Adapun tahapan-tahapan metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut: Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak di masa lampau. Kritik Sumber, adalah kegiatan untuk menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sejarah sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, asli, dan relevan dengan kajian yang dibahas. Interpretasi, yaitu tahapan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah serta membandingkan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga dapat ditetapkan makna dari fakta yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada. Historiografi, yaitu proses mensintesakan fakta atau proses menceritakan rangkaian fakta dalam suatu bentuk tulisan yang bersifat historis secara kritis analitis dan bersifat ilmiah berdasarkan fakta yang telah diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Liberal memberikan ruang dominannya peran partai-partai politik dalam mengatur jalannya roda pemerintahan, karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Namun kenyataannya koalisi yang dibangun sering kurang mantap dan partai-partai politik dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Lebih parahnya lagi kemacetan politik tidak hanya terjadi di parlementer, tetapi juga menjalar di Majelis Konstituante yakni anggota-anggota partai-partai politik yang tergabung dalam Majelis Konstituante tidak mampu mencapai konsensus mengenai dasar negara dan undang-undang dasar baru (Budiardjo, 1989 : 70) Seluruh anggota Majelis Konstituante berjumlah 542 orang, tetapi tidak ada satu fraksi pun yang

berhasil mencapai dua pertiga dari jumlah tersebut untuk memenuhi prosedur penetapan UUD yang sah. Pancasila, Islam dan Sosial Ekonomi adalah tiga nama yang diusulkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia nantinya.

Melihat kenyataan berpolitik seperti ini, Soekarno tidak hanya berpangku tangan sembari mengutuki keadaan. Sebagai orang yang mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang sanggup memberikan keagungan kepada bangsa Indonesia. Soekarno bersikeras mencari solusi dari kemacetan politik yang ada. Melalui konsep Demokrasi Terpimpin ia mencela Demokrasi Barat yang liberalistis yang menyebabkan tak mampu membentuk sebuah pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun jalannya revolusi. Secara eksplisit Soekarno menyatakan :

Demokrasi yang saya dambakan untuk Indonesia bukanlah demokrasi liberal seperti yang terdapat di Eropa Barat. Tidak! Apa yang saya inginkan untuk Indonesia adalah suatu demokrasi terpimpin, suatu demokrasi dengan pimpinan. Demokrasi terpimpin, demokrasi terpimpin, sesuatu yang dipimpin tetap demokrasi. (Karim, 1983 : 141)

Dengan sistem partai kita mengalami kemacetan total. Itu tidak sehat; harus dirombak sama sekali. Penyakit inilah yang menyebabkan kita selalu cakar-cakaran satu sama lain. Karena itu sekarang marilah kita bersama-sama mengubur semua partai (Karim, 1983 : 140-141)

Pernyataan Presiden Soekarno itu mendapatkan kritik tajam dari Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi, balas menanggapi : Selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada, dengan atau tidak dengan keputusan pemerintah. Selama masih ada kebebasan partai, selama itu pula demokrasi ditegakkan. Kalau demokrasi dikubur, demokrasi pun otomatis akan dikubur, dan di atas kuburan

itu hanya diktator yang akan memerintah (Noer, 1987 : 354)

Menurut Partai Masyumi demokrasi bukan semata-mata cara yang dapat dirubah setiap waktu menurut keadaan, demokrasi adalah sebagai jalan atau pandangan hidup. Sementara menanggapi kemacetan politik yang melanda di parlemen dan Majelis Konstituante, Partai Masyumi berpendapat bahwa implementasi demokrasi sebagai suatu sistem terkadang sukar oleh sebab itu menuntut pengalaman dan harus pula melalui berbagai cobaan yang kadang-kadang pahit. Maka dari itu Partai Masyumi tidak menyalahkan sistem Demokrasi Liberal atau multipartai, melainkan penekanan pada koreksi diri dari tokoh-tokoh partai politik yang menjadi biang kemacetan politik. Untuk itu Natsir menegaskan:

Bahwa salah satu syarat demokrasi ialah bahwa pendukungnya harus memakai partai sebagai alat menurut peraturan yang wajar dan bahwa para pendukung ini harus jujur menegakkan nilai-nilai yang berharga dalam hidup. Jangan sebaliknya alat-alat itu yang dijadikan tujuan dengan menginjak nilai-nilai hidup (Noer, 1987 : 354)

Meski mendapat kritik dari beberapa pihak, ide Demokrasi Terpimpin itu tetap dijawantahkan ke dalam Konsepsi Presiden yang diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957. Konsepsi Presiden pada prinsipnya mengandung tiga hal pokok di dalamnya. Pertama, akan diperkenalkannya gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Kedua, mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong yang meliputi seluruh wakil partai yang ada di parlemen, termasuk PKI. Ketiga, dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional (Sjamsuddin (ed), Chusnul Mar`iyah, 1988 : 176).

Konsepsi Presiden itu kemudian menimbulkan pro kontra, partai-partai seperti PNI, PKI, Baperki

dan Murba menyokongnya dengan serta merta berupa pernyataan-pernyataan tercetak, rapat-rapat umum, pengiriman delegasi dan lain-lain. Sedangkan partai-partai agama, seperti Partai Masyumi, Partai NU, PSII dan Partai Katholik menolaknya karena menganggap bahwa konsepsi itu menyinggung masalah yang fundamental bertalian dengan susunan ketatanegaraan yang seharusnya menjadi wewenang Konstituante (Rosidi, 2011 : 199)

Sikap keras Partai Masyumi terhadap rezim Demokrasi Terpimpin membuat Soekarno pada akhirnya berada pada suatu kesimpulan, bahwa langkah-langkah untuk menyingkirkan Partai Masyumi dari peta perpolitikan Indonesia harus segera disusun. Soekarno merasa perlu menggunakan cara-cara yang "legal konstitusi" dan sedikit campuran pembenaran dari "logika revolusi" untuk menyingkirkan partai tersebut, sebab biar bagaimanapun Partai Masyumi adalah partai Islam terbesar yang memiliki potensi kesensitifan apabila membubarkan partai tersebut dengan cara-cara yang tanpa memiliki payung konstitusi di atasnya.

Tepat di pengujung tahun yakni pada tanggal 31 Desember 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No.7/1959. Penpres ini lebih mengarah pada langkah untuk menyingkirkan Partai Masyumi. Hal itu bersinyalir pada pasal 9 yang menyebutkan bahwa Presiden setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung dapat melarang atau membubarkan partai yang sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan sedangkan partai tidak resmi menyalahkan perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya (Sjamsuddin (ed) Chusnul Mariyah, 1988 : 198-199). Dikeluarkannya Penpres ini merupakan semacam bom waktu bagi Partai Masyumi, karena setelah sebelumnya tidak dilibatkan di dalam Kabinet Kerja, DPA dan Dewan Perancang Nasional, sekarang ini ditambah

eksistensi Partai Masyumi di gelanggang politik nasional terancam.

Di sisi lain Soekarno juga membentuk suatu logika revolusi yang dipergunakannya untuk mengenyahkan eksistensi Partai Masyumi, yaitu dengan membenturkan sikap penolakan Partai Masyumi pada ide Nasakom terhadap hilangnya kesetiaan kepada azas dan tujuan negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Soekarno menyatakan : Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila! Sekarang saya tambah: Siapa setuju kepada UUD 1945 harus setuju kepada Nasakom, siapa tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada UUD 1945 (Ma'arif, 1996 :104)

Partai Masyumi yang menyatakan sikap menolak terhadap ide Nasakom, dengan menggunakan logika Revolusi di atas secara tidak langsung diseret pada kriteria seperti yang ditetapkan pada Bab IX Pasal 9 dari Penpres No.7/1959 yaitu sikap yang bertentangan dengan azas dan tujuan negara.

Mengawali tahun 1960 konflik parlemen dengan Soekarno muncul ke permukaan, ketika itu parlemen menentang keras Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Partai Masyumi dan PSI berperan sebagai provokator pemboikotan RAPBN itu. Soekarno tidak kehilangan akal untuk meluluskan segala maksudnya, dengan pertimbangan bahwa selama komposisi parlemen tidak disterilkan dari unsur-unsur oposisi atau dalam istilah lain tidak di Nasakomisasi, maka selama itu pula kebijakan-kebijakan pemerintah akan diganjil. Maka atas pertimbangan itu pula lah sikap yang ditempuh Soekarno dalam meluluskan kehendaknya untuk mensahkan RAPBN dengan menempuh cara yang kasar yakni membubarkan parlemen dari hasil Pemilu 1955 tersebut (Soyomukti, 2010 : 159). Pada 5 Maret

1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No.3/1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955. Alasan presiden membubarkan lembaga pemerintahan tersebut atas dasar bahwa DPR hasil pemilihan umum 1955 tidak memenuhi harapan untuk saling membantu pemerintah, tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu karena susunan DPR yang sekarang ini hasil dari UUDS 1950.

Pada 21 Juli 1960 Presiden Soekarno mengundang tokoh-tokoh dari Partai Masyumi ke Istana Bogor, dan seminggu berikutnya pertemuan dilanjutkan kembali di Istana Merdeka yakni untuk memenuhi undangan presiden yang meminta jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan yang diajukan presiden kepada Partai Masyumi sehubungan dengan dikeluarkannya Penpres No 7/1959 yang diundangkan akhir tahun 1959. Selain Partai Masyumi diundang juga tiga tokoh PSI juga mengemban topik permasalahan yang sama. Delegasi dari Partai Masyumi diwakili oleh Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito dan Sekretaris Umum Yunan Nasution.

Bersandar pada hasil pemanggilan perwakilan Partai Masyumi ke istana dan melihat dari sikap mereka yang tetap keras mendebat pemerintah. Soekarno menilai Partai Masyumi tidak lebihnya seperti kekuatan kepala batu yang hanya akan merintang jalannya revolusi Indonesia. Menurut logika revolusi Soekarno, Masyumi tidak patut lagi hidup dan harus dikorbankan demi revolusi (Ma'arif, 1996 : 54). Tepat pada hari perayaan dirgahayu kemerdekaan yakni 17 Agustus 1960 dengan berpijak pada Penpres No 7/1959 Pasal 9, ditambah dengan menetapkan Kepres No 200/1960 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa untuk kepentingan keselamatan negara dan bangsa, perlu membubarkan Partai Masyumi oleh karena partai itu melakukan pemberontakan. Diputuskanlah oleh pemerintah untuk membubarkan Partai

Masyumi termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-rantingnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sikap pembubaran diri itu dengan menimbang dari segala konsekuensi yang mesti dihadapi apabila Partai Masyumi tetap kukuh tidak mau membubarkan diri yaitu dapat menimbulkan ekses penangkapan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan Partai Masyumi di seluruh tanah air, dan hal itu tidak menjamin bakal tidak mendapatkan perlawanan fisik. Maka dengan kebesaran hati demi menjaga keselamatan umat dari kemudharatan yang lebih riskan, Partai Masyumi pada tanggal 13 September memutuskan membubarkan diri.

## KESIMPULAN

Dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno tidak sedikit pun memberikan ruang bagi Partai Masyumi untuk terlibat di dalam pemerintahan. Wakil-wakil Partai Masyumi tidak dimasukkan di dalam Kabinet Kerja, DPA dan Deppernas, kemudian disusul tindakan Soekarno yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 di bulan Maret 1960 dan pengumuman pembentukan DPR GR di bulan Juni 1960 yang didalamnya tidak satu pun perwakilan Partai Masyumi diikutsertakan sebagai anggota DPR. Klimaksnya Partai Islam terbesar itu pada akhirnya harus dibubarkan melalui Penpres No.7/59 dan Keppres No.200/60. Hal ini lebih disebabkan atas kegigihannya memperjuangkan hak-hak demokrasi dengan melawan sistem tirani, dan sebagai konsekuensi dari sikap para pemimpinnya yang selalu menunjukkan vokal oposisi terhadap Soekarno. Meskipun akhirnya dibubarkan, Partai Masyumi telah mewariskan teladan mengenai sikap *amar ma'ruf nahi mungkar* yang selalu konsisten diamalkan dengan menempuh segala resiko yang dihadapinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam.1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.

Karim, Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta : CV Rajawali.

Maarif, Ahmad Syafii.1996. *Islam dan Politik ; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta : Gema Insani Press.

Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta : Grafiti Pers.

Ricklefs, MC. 2005 .*Sejarah Indonesia Modern*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Rosidi, Ajip. 2011. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta : Pustaka Jaya

Sjamsuddin, Nazaruddin (ed). 1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta : CV Rajawali.

Soyomukti, Nurani. 2010. *Soekarno Otoriter*. Yogyakarta : Garasi

Suryanegara, Ahmad Mansyur. 2010. *API Sejarah 2*. Bandung : Salamadani.

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75. 1959. *tentang Dekrit Presiden Republik Indoensia kembali kepada Undang-undang Dasar 1945*  
*Harian Suara Merdeka*, edisi Jum`at 30 Juli 1959

